

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Setiap negara menginginkan pemerintahan yang dapat berupaya untuk berpartisipasi dalam mewujudkan *Good governance*. Salah satu prinsip strategis yang perlu dan harus dikembangkan saat ini adalah prinsip tata kelola keuangan yang baik diperlukan penguatan sistem dan kelembagaan dengan berdasarkan pada peraturan perundang-undangan serta standar penyajian laporan keuangan yang berlaku. Prinsip tata kelola keuangan yang baik akan mempengaruhi kinerja pemerintah yang menyajikan atau yang membuat laporan keuangan (Azzindani & M. Irwan, 2020). Penyusunan laporan keuangan yang berpedoman pada standar akuntansi pemerintah, dalam hal ini akuntansi sektor publik bermanfaat untuk pemenuhan kebutuhan informasi keuangan secara umum yang lebih berkualitas bagi para pengguna laporan keuangan di dalam rangka menilai akuntabilitas dan membuat keputusan ekonomi, sosial maupun politik (Hartati et al., 2020).

Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (AKIP) merupakan salah satu unsur pokok perwujudan *good governance* yang saat ini sedang diupayakan di Indonesia. Pemerintah diminta untuk melaporkan hasil dari program yang telah dilaksanakan sehingga masyarakat dapat menilai apakah pemerintah telah bekerja dengan ekonomis, efisien dan efektif (Laoli, 2019). Untuk mengimplementasikan akuntabilitas kinerja pemerintah yang baik memerlukan suatu sistem yang efektif dan saling terkoordinasi serta adanya aturan yang menjadi acuan bagi instansi pemerintah (Nadila et al., 2021).

Akuntabilitas adalah bentuk pertanggungjawaban atas tindakan yang dilakukan suatu instansi pemerintah dalam kurun waktu satu periode yang dirangkum dalam media pelaporan. Pertanggungjawaban yang dimaksud adalah bentuk pelaporan kepada pimpinan masing-masing, instansi *monitoring* serta evaluasi pertanggungjawaban, lalu diserahkan pada setiap kepala pemerintahan (Martini, 2019). Laporan itu menjelaskan kemampuan

masing-masing lembaga melalui laporan pertanggungjawaban kerja instansi pemerintah (Amrullah, 2019). Standar akuntansi diperlukan agar laporan keuangan yang dihasilkan pemerintah dapat diperbandingkan, dan adanya kesamaan persepsi dan pemahaman antara penyaji laporan keuangan pengguna laporan keuangan maupun pengawas laporan keuangan (Mangar et al., 2022). Penerapan akuntansi yang baik oleh instansi pemerintah dan pengawasan yang optimal terhadap kualitas laporan keuangan instansi pemerintah diharapkan akan dapat memperbaiki akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sehingga kinerja penyelenggaraan urusan- urusan pemerintah dapat optimal (Septiani et al., 2016).

Kurangnya ketaatan dan kepedulian atas penerapan sistem akuntansi yang sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku masih banyak terjadi di daerah-daerah, Berdasarkan Undang-undang (UU) Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018 dan Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Informasi Publik pada Badan Pemeriksa Keuangan, maka perlu adanya akuntansi sektor publik yang baik.

Akuntansi sektor publik merupakan suatu alat informasi sebagai penyedia informasi akuntabilitas dan pengendalian manajemen bagi pemerintah maupun publik (Hidayat, 2022). Kebijakan reformasi keuangan negara atau daerah dalam rangka mewujudkan *good governance* pada instansi pemerintah di Indonesia mulai dilaksanakan seiring dengan berlakunya aturan mengenai implementasi standar akuntansi pemerintah dalam Peraturan Pemerintah (Djalante, 2022). Prinsip yang harus dilaksanakan adalah tata kelola keuangan yaitu penyajian laporan keuangan yang baik agar terwujud *good governance* instansi pemerintah perlu dilakukan peningkatan terhadap kualitas akuntabilitas dan kinerja instansi pemerintah sehingga akan meminimalisir praktik korupsi, kolusi dan nepotisme.

Akuntansi sektor publik memiliki kaitan yang erat dengan penerapan dan perlakuan akuntansi pada domain publik (Alifa et al., 2018). Domain publik sendiri memiliki wilayah yang relatif luas dan kompleks dibandingkan dengan sektor swasta/bisnis. Jika diamati secara lebih mendalam, akuntansi sektor publik memiliki peranan yang vital dan menjadi subyek untuk didiskusikan baik oleh praktisi sektor publik maupun kalangan akademisi (Tadjudinsyah, 2023). Fokus perhatian pembahasan akuntansi sektor publik yang hendaknya mendapat porsi yang lebih besar dari kalangan praktisi maupun akademisi adalah penekanan pada upaya untuk memajukan sektor publik yang dianggap kurang efisien dan kurang menarik agar tidak tertinggal jauh dengan sektor swasta yang dipandang lebih maju dan efisien. Namun demikian, saat ini pada kalangan praktisi khususnya pemerintahan, sudah mulai ada perhatian yang lebih besar terhadap penilaian kelayakan praktik manajemen pemerintahan yang mencakup perlunya dilakukan perbaikan sistem akuntansi manajemen, sistem akuntansi keuangan, perencanaan keuangan dan pembangunan, sistem pengawasan dan pemeriksaan, serta berbagai implikasi financial atas kebijakan-kebijakan yang dilakukan pemerintah (Tadjudinsyah, 2023).

Tuntutan akuntabilitas pada lembaga publik, baik di pusat maupun daerah, mendorong pentingnya transparansi dan pertanggungjawaban dalam pengelolaan sumber daya publik. Oleh karena itu, seluruh instansi pemerintah, termasuk Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Bandar Lampung, diharapkan untuk mengembangkan perencanaan strategis sebagai bagian integral dari tata kelola yang baik. Dalam konteks ini, OPD Kota Bandar Lampung sebagai contoh, memiliki peran yang signifikan dalam menjalankan fungsi pemerintah daerah. Tanggung jawabnya melibatkan tidak hanya pengelolaan keuangan dan aset, tetapi juga penyusunan serta penyampaian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) kepada kepala daerah, yaitu Wali Kota Bandar Lampung. (Rohmah, 2023).

Keberhasilan Pemda Kota Bandar Lampung pada tahun 2022 tidak lepas dari berjalannya beberapa program yang mempunyai dampak langsung dan tidak langsung. Secara keseluruhan, pelaksanaan program untuk mencapai setiap tujuan berhasil. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022 telah menetapkan bantuan anggaran program tahun 2022 yang bertujuan untuk memperlancar pencapaian target. Tabel di bawah ini menampilkan Anggaran Belanja Realisasi (APBD) Kota Bandar Lampung tahun 2022

Tabel 1.1
Anggaran Realisasi APBD Kota Bandar Lampung tahun 2022

NO	U R A I A N	APBD- P2022 (Unaudited)	REALISASI 2022	%	REALISASI 2021 (Audited)
28	JUMLAH PENDAPATAN (7+23+27)	2,508,891,399,279.00	2,181,939,042,822.87	86.97%	2,127,749,572,151.91
29	BELANJA				
30	BELANJA OPERASI				
31	Belanja Pegawai	981,393,677,730.34	63,375,394,263.07	87.97%	845,890,462,056.11
32	Belanja Barang dan Jasa	1,287,899,991,515.04	70,981,734,775.78	67.63%	694,849,885,185.10
33	Belanja Bunga	11,000,000,000.00	0,265,113,770.00	93.32%	15,119,791,378.00
34	Belanja Subsidi	2,458,578,427.00	2,458,574,500.00	99.99%	-
35	Belanja Hibah	100,496,377,179.00	2,597,051,357.00	82.19%	27,731,375,400.00
36	Belanja Bantuan Sosial	5,680,000,000.00	-	-	9,495,828,600.00
37	Jumlah Belanja Operasi (31 s/d 36)	2,388,928,624,851.38	1,829,677,868,665.85	76.59%	1,593,087,342,619.21
38	BELANJA MODAL				
39	Belanja Modal Pengadaan Tanah	-	-	-	-
40	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	65,689,536,538.00	9,214,431,118.00	59.70%	66,056,651,444.00
41	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	199,527,221,455.16	52,562,250,068.15	76.46%	169,003,826,345.00
42	Belanja Modal Jalan Irigasi dan Jaringan	305,010,976,000.00	12,429,244,155.00	69.65%	162,701,972,995.00
43	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	23,953,797,496.00	0,545,050,932.00	85.77%	3,021,435,374.00
44	Jumlah Belanja Modal (39 s/d 43)	594,181,531,489.16	424,750,976,273.15	71.49%	400,783,886,158.00
45	BELANJA TAK TERDUGA				
46	Belanja Tak Terduga	46,148,000,000.00	9,190,717,061.00	41.59%	24,519,891,197.00
47	Jumlah Belanja Tak Terduga(46)	46,148,000,000.00	19,190,717,061.00	41.59%	24,519,891,197.00
48	JUMLAH BELANJA (37+44+47)	3,029,258,156,340.54	2,273,619,562,000.00	75.06%	2,018,391,119,974.21
49	BELANJA TRANSFER				
50	Belanja Bagi Hasil	-	-	-	-
51	Belanja Bantuan Keuangan	-	-	-	-
52	Jumlah Belanja Transfer (50s/d 51)	-	-	-	-
53	JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER (48+52)	3,029,258,156,340.54	2,273,619,562,000.00	75.06%	2,018,391,119,974.21
54	SURPLUS / (DEFISIT) (28-53)	(520,366,757,061.54)	(91,680,519,177.13)	17.62%	109,358,452,177.70

Sumber: Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kota Bandar Lampung tahun 2022.

Berdasarkan data yang diperoleh, terlihat adanya kesenjangan antara anggaran yang direncanakan untuk membiayai program/kegiatan dengan realisasi anggaran yang dialokasikan. Hal ini menunjukkan bahwa tujuan anggaran tidak tercapai. Hal ini terlihat dari disparitas anggaran dan belanja aktual yang mengakibatkan terjadinya surplus anggaran. Hal ini berarti penyusunan APBD tidak memenuhi persyaratan dan menunjukkan program atau kegiatan tertentu tidak dilaksanakan dengan baik yang ditandai dengan belum memenuhi target RPJMD.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kota Bandar Lampung (LAKIP) Tahun 2022 merupakan laporan tahunan kedua yang ditujukan untuk mencapai tujuan dan target yang dituangkan dalam RPJMD 2021-2026. Hal ini sebagai sarana untuk meminta pertanggungjawaban Walikota sebagai Kepala Daerah. LAKIP berfungsi sebagai alat akuntabilitas dan metode strategis untuk evaluasi diri, yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja masa depan dalam mencapai praktik tata kelola yang baik dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. RPJMD Kota Bandar Lampung tahun 2021–2026 mencakup 31 indikator kinerja yang berkontribusi terhadap pencapaian 17 tujuan strategis.

Terdapat total 18 indikator kinerja obyektif yang masuk dalam kategori Sangat Baik, sedangkan kategori Baik terdiri dari 9 target indikator kinerja. Satu indikator tergolong cukup, sedangkan tiga indikator tergolong sangat kurang. Dari 31 indikator kinerja, terdapat 18 indikator yang berhasil memenuhi atau melampaui target RPJMD, dengan persentase peningkatan minimal 100%. Saat ini terdapat 9 indikator kinerja yang pencapaiannya kurang dari 100%, dengan rentang pencapaian antara 80% hingga 99,99%. Selain itu, terdapat 1 indikator yang mencapai 65,56%, dan 3 indikator yang pencapaiannya paling rendah, berkisar antara 0% hingga 40,77%. Tabel di bawah ini menampilkan pencapaian indikator kinerja untuk masing-masing tujuan.

Tabel 1.2
Capaian Indikator Kinerja Kota Bandar Lampung tahun 2022

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	SATUAN
1. Meningkatnya Derajat	1.1. Angka Harapan Hidup	71,72	71,66	Tahun

Kesehatan dan Terkendalinya Laju Pertumbuhan Penduduk	1.2. Prevalensi Stunting pada Anak Baduta (Bawah Dua Tahun)	6,50	5,16	Persen
	1.3. Laju pertumbuhan penduduk	1,109	2,13	Persen
2. Meningkatnya Mutu dan Pemerataan Pendidikan Bagi Seluruh Masyarakat	2.1. Angka Rata-Rata Lama Sekolah	10,96	10,96	Tahun
	2.2. Angka Harapan Lama Sekolah	16,14	14,71	Tahun
3. Meningkatnya Pengarusutamaan Gender, Anak dan Generasi Muda	3.1. Indeks Pembangunan Gender	93,88	93,93*	Angka
	3.2. Tingkat Capaian Kota Layak Anak	Madya	Nindya	Tingkat Capaian
	3.3. Persentase Pemuda Berprestasi	9,61	6,30	Persen
4. Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Jalan dan Jembatan	Proporsi Panjang Jaringan Jalan dan Jembatan dalam Kondisi Mantap	85,81	89,95	Persen
5. Meningkatnya Pengendalian Banjir	5.1. Persentase Daerah Rawan Banjir	55,0	84	Persen
6. Meningkatnya Akses Masyarakat Terhadap Permukiman Layak	6.1. RTLH yang tertangani pertahun	23,63	0	Persen
	6.2. Persentase Kawasan Kumuh	0,890	0,89	Persen
7. Meningkatnya Kualitas Tata Ruang	7.1. Persentase Pemanfaatan Ruang Sesuai RTRW	54,65	54,65	Persen
8. Menurunnya Masalah Kemacetan	8.1. Persentase Titik Kemacetan yang terselesaikan	50,00	40	Persen
9. Meningkatnya Sektor Unggulan Daerah	9.1. Kontribusi Industri Pengolahan terhadap PDRB	21,20	21,09	Persen
	9.2. Kontribusi Perdagangan terhadap PDRB	14,05	14,94	Persen
	9.3. Kontribusi Jasa, Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum terhadap PDRB	15,34	14,82	Persen
	9.4. Persentase UMKM yang Meningkatkan Labanya	31,50	30,54	Persen
	9.5. Persentase Koperasi Sehat dan Cukup Sehat	18,11	18,83	Persen
10. Meningkatnya Investasi dan Memperluas Kesempatan Kerja	10.1. Pertumbuhan Nilai Investasi (PMDN)	15,99	43,94	Persen
	10.2. Pertumbuhan Nilai Investasi (PMA)	5,05	24,77	Persen
	10.3. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	8,51	7,91	Persen
11. Menurunnya Kemiskinan	11.1. Persentase penduduk diatas garis kemiskinan	91,43	91,79	Persen
	11.2. Pendapatan Per Kapita Penduduk	54 – 56	56.152.000	Juta RP
12. Meningkatnya Penanganan PMKS	12.1. Persentase PMKS yang tertangani	77,00	31,40	Persen
13. Meningkatnya Keamanan dan Ketertiban Umum Serta Toleransi Antar Umat Beragama	13.1. Angka kriminalitas yang tertangani	1.531	1.632	Angka
	13.2. Persentase Konflik Sosial, Keagamaan dan RAS yang tertangani	78,50	100	Persen
14. Meningkatnya Pelestarian Seni dan Budaya Daerah Meningkatkan Penerapan	14.1. Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan	40,00	40,00	Persen
15. Meningkatnya Penerapan Kebijakan Reformasi Birokrasi di Pemerintah Kota Bandar Lampung	15.1. Indeks RB (Reformasi Birokrasi)	61,00 (CC)	58,77 (CC)	Skor
16. Meningkatnya Kualitas Lingkungan	16.1. Indeks kualitas lingkungan hidup	61,43	58,86	Angka

Hidup	(IKLH)			
17. Meningkatnya Pengendalian Resiko Bencana	17.1. Indeks Resiko Bencana	139,048 (Tinggi)	165,56*	Angka

Sumber: Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kota Bandar Lampung tahun 2022.

LAKIP adalah bentuk nyata dari kewajiban OPD Kota Bandar Lampung untuk bertanggung jawab atas keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang ditetapkan oleh kepala daerah. Harapan Wali Kota Bandar Lampung yang terukur secara jelas terdapat dalam Rencana Strategis (Renstra) dan Perjanjian Kinerja (PK). Oleh karena itu, LAKIP menjadi alat evaluasi yang krusial untuk menilai sejauh mana OPD telah mencapai tujuan-tujuan strategis yang ditetapkan. Selain sebagai alat akuntabilitas, penyusunan LAKIP juga melibatkan aspek pengembangan berkelanjutan.

Dengan mengevaluasi kinerja masa lalu, OPD Kota Bandar Lampung dapat mengidentifikasi area-area yang perlu diperbaiki. Oleh karena itu, LAKIP bukan hanya merupakan tugas administratif rutin, melainkan juga upaya berkelanjutan untuk meningkatkan kinerja OPD di masa mendatang serta mampu memberikan pelayanan dan manfaat yang optimal kepada masyarakat, sejalan dengan misi dan tujuan organisasi.

Sumber keuangan utama yang dikelola oleh pemerintah daerah dalam menjalankan berbagai proyek pembangunan atau kegiatan untuk melayani masyarakat tersebut telah dirancang sedemikian rupa melalui APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah), di mana sebagian berasal dari dana pajak, hibah dan sumber pendapatan lain yang telah dihimpun dari masyarakat. Oleh sebab itu, maka pemerintah daerah perlu mempertanggungjawabkan segala bentuk penggunaan alokasi sumber dana keuangan yang digunakannya secara terbuka kepada masyarakat. Hal itu disebabkan sumber dana utama yang pemerintah daerah kelola merupakan sebuah amanah dari masyarakat yang dititipkan untuk dikelola dengan baik dalam rangka mencapai kesejahteraan semua (Ridlo, 2020).

Karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Agar dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki, laporan keuangan pemerintah menurut PP No. 71 Tahun 2010 harus memenuhi empat karakteristik yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa dengan adanya laporan keuangan yang baik pusat maupun daerah, sudah seharusnya dikelola dengan baik, transparan, ekonomis, efisien, efektif dan akuntabel. Penyajian laporan keuangan yang baik didasarkan pada kinerja akuntabilitas yang menyampaikan serta membuat laporan keuangan tersebut. Berdasarkan peraturan perundangan berupa Permen PAN&RB No. 88 Thn. 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang merupakan salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab.

Penelitian ini mengacu pada penelitian (Hikmawati, 2022) dengan judul Pengaruh Akuntansi Sektor Publik Dan Kualitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Di Kabupaten Jember (Studi Kasus Pada BPKAD Kabupaten Jember). Pada penelitian ini menyatakan bahwa secara parsial variabel kualitas laporan keuangan berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Variabel kualitas laporan keuangan berbeda dengan variabel akuntansi sektor publik yang berpengaruh tetapi tidak signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Sedangkan secara simultan variabel akuntansi sektor publik dan kualitas laporan keuangan berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan ada pada letak obyek dan lokasi penelitian. Berdasarkan fenomena di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti kembali mengenai penerapan akuntansi sektor publik, akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dengan judul **“PENGARUH AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK DAN KUALITAS LAPORAN KEUANGAN TERHADAP AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (STUDI KASUS ORGANISASI PEMERINTAH DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG)”**

1.2 Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian yang dilakukan pada tahun 2023 ini merupakan penelitian lapangan menggunakan metode survei dengan menyebarkan kuisioner kepada instansi pemerintah di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Bandar Lampung. Penelitian ini hanya mencakup pengaruh akuntansi sektor publik dan kualitas laporan keuangan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah OPD di Kota Bandar Lampung.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan ruang lingkup penelitian diatas maka, dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apakah akuntansi sektor publik berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di Kota Bandar Lampung?
2. Apakah kualitas laporan keuangan berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di Kota Bandar Lampung?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menguji akuntansi sektor publik berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di Kota Bandar Lampung.
2. Untuk menguji kualitas laporan keuangan berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di Kota Bandar Lampung.

1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana akuntansi sektor publik dan kualitas laporan keuangan berkontribusi terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di tingkat lokal, yang dapat membantu memperbaiki praktik dan kebijakan yang ada.

Penelitian ini dapat di gunakan sebagai informasi tambahan bagi pihak yang membutuhkan dan dapat di jadikan dasar dan bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan bagi pemerintah.

2. Secara Praktis

Bagi Peneliti Selanjutnya Penelitian ini dapat menambah wawasan serta pemahaman peneliti dalam bidang akuntansi khususnya pengaruh akuntansi sektor publik dan kualitas laporan keuangan terhadap peningkatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di Kota Bandar Lampung serta tugas akhir skripsi ini akan memperkaya jumlah literatur yang dapat digunakan oleh kalangan akademisi.

1.6 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi Latar Belakang, Ruang Lingkup Penelitian, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini berisi Grand Teori, Variabel X, Variabel Y, Penelitian Terdahulu, Kerangka Pemikiran dan Bangunan Hipotesis.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini berisi Sumber Data, Metode Pengumpulan Data, Populasi dan Sampel, Variabel Penelitian dan Definisi Oprasional Variabel, Metode Analisis Data dan Pengujian Hipotesis.

BAB IV HASIL PENELITIAN

Bab ini berisikan Hasil Penelitian disertakan dengan Pembahasan.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisikan Kesimpulan dan Saran

DAFTAR PUSTAKA